

ORGANIZATION-PUBLIC RELATIONSHIPS OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA REMAJA

ORGANIZATION-PUBLIC RELATIONSHIPS BY BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA IN YOUTH

Oleh: Resmamita, 16419144004, *Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosiak, Universitas Negeri Yogyakarta*
Resmamita98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *organization-public relationships* yang diimplementasikan oleh BNNP DIY dalam menjalin hubungan dengan kalangan remaja DIY. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek penelitian adalah BNNP DIY dengan subjek penelitian yaitu tim Kehumasan dan bagian Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data adalah wawancara. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OPR yang diimplementasikan BNNP DIY berupa aspek komunikasi adalah BNNP DIY menyesuaikan bahasa dengan remaja dalam proses komunikasinya namun masih kurang konsistens. Sumber daya, belum optimal dilakukan karena BNNP DIY belum punya divisi Kehumasan khusus. Disposisi, BNNP DIY berkomitmen dengan program Satuan Tugas Anti Narkoba (STAN) dan demokratis dalam pengelolaannya. Struktur birokrasi belum optimal dilakukan karena di BNNP DIY terdapat dual fungsi personil dalam birokrasinya.

Kata Kunci : *organization-public relationships, bnnp diy, remaja*

Abstract

This research aimed to knowing the organization-public relationships implemented by BNNP DIY in establishing relationships with DIY youth. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The object of research is BNNP DIY with research subjects namely Public Relations team and Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) section, which was determined by purposive sampling technique. The data collection technique is interviews. The validity of the data was conducted by triangulation of sources. Data analysis techniques using interactive techniques. The results of this study indicate that the implementation of OPR implemented by BNNP DIY in the form of communication is that BNNP DIY adjusts language with adolescents in the communication process. Resources are not yet optimal because BNNP DIY does not yet have a special Public Relations division. Disposition, BNNP DIY is committed to the Satuan Tugas Anti Narkoba (STAN) program and is democratic in its management. Bureaucratic structure is not optimal because in BNNP DIY there are dual functions of personnel in the bureaucracy

Keywords: *public-organization relations, bnnp diy, youth*

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia yang ada di Negara Indonesia tidak bisa terlepas dari peran bidang pendidikan. Pendidikan memegang peran yang krusial untuk membangun karakter serta mental yang positif agar Indonesia bisa memiliki sumber daya manusia yang bermanfaat. Salah satu sumber daya manusia yang penting untuk mendapatkan asupan pendidikan yang baik adalah anak-anak dan remaja.

Pengembangan dan pertumbuhan remaja tidak bisa lepas dari pengaruh dunia pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk membentuk diri seseorang agar dapat memberikan kontribusi yang baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Tujuan pendidikan belum bisa dikatakan telah berhasil diraih oleh Negara Indonesia dikarenakan bidang pendidikan memiliki masalah-masalah yang harus dihadapi. Masalah-masalah besar yang dihadapi oleh dunia pendidikan antara lain adalah ancaman penyalahgunaan narkoba, kekerasan di institusi pendidikan dan krisis kebangsaan (<https://nasional.sindonews.com> diakses pada tanggal 8 Desember 2019).

Narkoba menjadi salah satu dari masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional-Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (BNN-PPKUI) pada tahun 2016 dijelaskan bahwa provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi yang menempati urutan pertama dalam angka penyalahgunaan narkoba. Analisis mengenai tingginya angka penggunaan narkoba di DIY adalah bahwa provinsi DIY khususnya kota Yogyakarta merupakan kota pelajar sehingga menjadi pasar yang begitu menguntungkan untuk mengedarkan narkoba dan mengantarkan DIY menjadi prevalensi pemakai narkoba yang tertinggi di Indonesia. (<https://www.krjogja.com>, diakses pada tanggal 2 Desember 2019).

Berdasarkan data tersebut maka terdapat kesenjangan yang besar antara kondisi ideal yang diharapkan dalam dunia pendidikan dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Salah satu kondisi ideal yang diharapkan dalam dunia pendidikan adalah pelajar memiliki prestasi akademik dan non-akademik serta karakter yang baik agar bisa menciptakan sumber daya manusia

yang unggul sedangkan provinsi DIY mendapat predikat provinsi dengan angka penyalahgunaan narkoba.

Solusi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani narkoba adalah dengan membentuk Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI). Pembentukan BNN RI tercantum dalam Peraturan Presiden No. 83 Th. 2007 tentang BNN RI yang selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 65 yang menyebutkan bahwa BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, salah satunya adalah BNNP DIY.

BNNP DIY bertugas untuk memberantas narkoba di provinsi DIY memiliki banyak pekerjaan berupa program serta tindakan nyata untuk menurunkan DIY dari predikatnya sebagai provinsi dengan penyalahguna narkoba tertinggi se-Indonesia. Salah satu peran BNNP DIY kepada publik dalam memberantas narkoba adalah pada tahun 2019 berhasil menyelesaikan 20 kasus narkoba dengan menangkap 25 tersangka, tetapi masih terdapat 6 kasus yang belum diselesaikan karena BNNP DIY menerima 26 berkas kasus selama 2019. BNNP DIY selama 2019 menangkap barang bukti sabu-sabu sebanyak 6.283,42 gram dan ganja seberat 774,84 gram (www.republika.co.id, diakses pada tanggal 12 Januari 2020).

BNNP DIY dalam menangani narkoba memiliki peran sebagai lembaga yang preventif, kuratif sekaligus represif yang membutuhkan dukungan publik agar bisa berjalan dengan maksimal. Divisi yang menangani mengenai hubungan antara organisasi dengan publik adalah divisi *Public Relations* (PR) namun ternyata BNNP DIY belum memiliki divisi khusus PR ini. BNNP DIY memberikan tugas untuk melayani publik kepada tim khusus PR yang belum berbentuk divisi melainkan hanya tim saja serta tim khusus ini juga belum masuk kedalam struktur organisasi yang didalamnya terdapat divisi-divisi yang bergerak di BNNP DIY.

Berdasarkan hasil wawancara pra-riset yang dilaksanakan pada 21 Oktober 2019 dengan Kepala Sub Bagian Administrasi yaitu Sri Hastutik, S.Si., M.Si yang juga menjadi salah satu dari anggota tim khusus PR BNNP DIY, menyatakan bahwa tim khusus PR BNNP DIY masih kewalahan untuk menangani program-

program yang berhubungan dengan publik dikarenakan banyaknya pekerjaan lain yang harus dilakukan serta kurangnya pemahaman dibidang PR sehingga menghambat perkembangan PR BNNP DIY terutama di era sekarang dengan *market* yang terbesar yaitu remaja DIY.

Upaya menjalin hubungan dengan publik dibahas dalam beberapa teori yang salah satunya adalah *organization-public relationships* (OPR). Berdasarkan pengamatan pra-riset yang dilaksanakan pada 21 Oktober 2019, kegiatan OPR juga dilakukan oleh BNNP DIY sebagai lembaga yang memiliki publik. Tatanan publik yang dimiliki oleh BNNP DIY berada dalam berbagai level yang diantaranya adalah institusi pemerintahan lainnya, institusi swasta, kalangan masyarakat, komunitas dalam masyarakat, keluarga hingga kalangan pelajar. OPR juga bisa dilakukan melalui media seperti media massa..

BNNP DIY juga membutuhkan media massa untuk menjangkau publik namun BNNP DIY belum aktif menggunakannya. Media massa hanya akan diundang ke BNNP DIY jika BNNP DIY berhasil mendapatkan dan menyelesaikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sehingga fungsi media massa di BNNP DIY lebih kepada laporan kinerja namun untuk merangkul masyarakat menggunakan media massa terasa masih kurang terutama remaja yang seharusnya bisa dirangkul dengan OPR yang optimal dikarenakan remaja adalah salah satu publik yang besar di DIY yang seharusnya bisa dirangkul secara optimal untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai OPR yang diimplementasikan oleh BNNP DIY dalam menjangkau publiknya yang dalam hal ini adalah kalangan remaja untuk memaksimalkan peran-peran yang dimiliki oleh BNNP DIY khususnya komunikasi yang dilakukan oleh BNNP DIY kepada remaja DIY, agar bisa menjadi salah satu pertimbangan kedepannya untuk tim PR BNNP DIY supaya dapat menjangkau publik terutama kalangan remaja secara lebih maksimal.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sehingga penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016: 15) penelitian kualitatif deskriptif

merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana penulis berperan sebagai instrumen kunci.

SETTING PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Kompleks Perkantoran (Selatan Purawisata), Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

SUMBER DATA

Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016: 85), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan data dengan menentukan sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh penulis. Kriteria yang ditetapkan oleh penulis adalah narasumber dipilih dikarenakan berinteraksi langsung dengan kalangan remaja yang menjadi fokus publik dalam penelitian ini. Oleh karena itu, di BNNP DIY pihak yang berinteraksi langsung dengan remaja yaitu tim Kehumasan dan divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), maka sumber data primer yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini adalah 1 orang dari tim *public relations* BNNP DIY dan 1 orang dari staff Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

METODE DAN INSTRUMEN

PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Menurut Sugiyono (2016: 194), wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta digunakan jika sebuah penelitian membutuhkan untuk mengetahui pendapat dari responden secara lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur dengan tidak terpaku pada daftar pertanyaan namun tetap menyiapkan poin-poin yang akan ditanyakan dengan instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah penulis itu sendiri.

KEABSAHAN DATA

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk mengabsahkan data. Menurut Patton dalam Sutopo (2010: 78), triangulasi sumber adalah penulis dalam membandingkan dan mengecek kembali penelitian menggunakan berbagai sumber data yang berbeda. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dikarenakan penulis mengumpulkan data penelitian melalui 2 narasumber yang berbeda yang akan dibandingkan hasil jawabannya untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini.

ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14), yaitu reduksi data dengan cara penulis mereduksi data dengan cara memilih dan memilah, serta membuat kategori dan membuat abstraksi dari hasil wawancara dan observasi. Selanjutnya, penyajian data dengan data yang disajikan dalam bentuk catatan wawancara dan catatan observasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga penulis dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Selanjutnya penarikan kesimpulan dengan menarik kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Organization-public relationships (OPR) yang diimplementasikan di BNNP DIY ditinjau melalui empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penjelasan mengenai implementasi OPR ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek komunikasi dalam implementasi OPR ini terbagi menjadi tiga yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi pesan yang dilakukan BNNP DIY adalah dengan menyesuaikan bahasa dalam mentransmisikan pesannya dengan remaja agar bisa diterima dan dianggap setara agar apa yang disampaikan oleh BNNP DIY bisa tersampaikan. Penyesuaian bahasa yang dilakukan adalah pegawai BNNP DIY saat berkomunikasi dengan remaja DIY menggunakan humor dan juga menggunakan kata 'bro' dan 'sist' saat berbicara dengan remaja dalam acara-acara yang diikuti ataupun dibuat oleh BNNP DIY. Penggunaan humor ini sering dilakukan ketika menjadi narasumber dalam sebuah acara. Kejelasan yang bisa ditilik dari

penggunaan media sosial yang bisa langsung melakukan konfirmasi jika terdapat ketidakjelasan dan konsistensi yang masih butuh evaluasi dikarenakan kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan komunikasi yang lebih konsisten dengan remaja.

Menurut Theodore Herbert (1981) (dalam Suranto, 2010:3), komunikasi merupakan proses yang di dalamnya memindahkan pengetahuan antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi adalah salah satu aspek yang mempengaruhi implementasi OPR ini dikarenakan untuk mencapai hubungan yang ideal antara BNNP DIY dan remaja DIY secara efektif dibutuhkan komunikasi yang optimal untuk dilaksanakan secara keseluruhan baik dari sisi transmisinya, sisi kejelasan dari penyampaian pesannya serta konsisten melakukan proses komunikasi tersebut.

2. Aspek sumber daya dalam implementasi OPR membutuhkan dua hal yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. BNNP DIY belum optimal serta belum maksimal melaksanakan implementasi OPR dikalangan remaja DIY dari aspek sumber daya. Hal ini dikarenakan BNNP DIY belum memiliki sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi kehumasan untuk mengimplementasikan OPR dikarenakan belum adanya divisi khusus Kehumasan yang beranggotakan orang-orang berlatarbelakang keilmuan humas, sedangkan dari sisi sumber daya finansial BNNP DIY memiliki syarat administrasi yang besar untuk mendukung dana pada kegiatan remaja DIY sebagai bagian dalam implementasi OPR.

Sumber daya menjadi aspek penting dalam implementasi OPR sehingga jika aspek ini tidak optimal maka akan menjadi timpang implementasi untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan orang-orang yang akan berperan sebagai implementor merupakan bagian dari sumber daya yaitu sumber daya manusia. Tidak hanya sumber daya manusia yang penting, sumber daya finansial yang bisa mempermudah hubungan juga diperlukan agar antar pihak merasa saling dibutuhkan dan diperhatikan dalam proses jalinan hubungan untuk membuat hubungan menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, BNNP DIY sebagai lembaga membutuhkan dua hal tersebut sebagai bagian krusial yang harus disiapkan sebelum membentuk lembaga.

3. BNNP DIY telah memunculkan aspek disposisi dalam mengimplementasikan OPR saat menjalin hubungan dengan kalangan remaja DIY melalui jujur ketika melayani sebagai lembaga pemerintah yang berada dibawah WBK dan WBBM dan berkomitmen dalam mengelola program STAN untuk selalu memperjuangkan regenerasi, dan meskipun memiliki wewenang untuk mengatur STAN tetapi BNNP DIY secara demokratis membebaskan pengurus STAN yang merupakan remaja untuk menentukan program-program kerja yang diinginkan untuk mencegah narkoba dikalangan remaja.

Lembaga dijalankan oleh manusia sehingga lembaga mendapat pengaruh dari karakter-karakter yang dimiliki manusia. Berdasarkan disposisi, karakter yang penting dimiliki lembaga adalah jujur, komitmen dan demokratis yang mana juga merupakan bagian dari karakter manusia. BNNP DIY sebagai lembaga juga telah membuktikan bahwa mereka mempunyai karakter-karakter dalam aspek disposisi ini. Disposisi ini dijalankan oleh pegawai-pegawai BNNP DIY sebagai perwakilan dari lembaga sebab wajah lembaga di mata publik diwakilkan dengan makhluk hidup didalamnya yang dalam hal ini pegawai ataupun karyawannya saat berhubungan dengan public yang penelitian ini adalah pegawai BNNP DIY dan remaja DIY.

4. Struktur birokrasi yang dimiliki oleh BNNP DIY masih terdapat dual fungsi personil yang bisa membingungkan dalam pelaksanaannya sebagai bentuk dari belum optimalnya pembagian tugas dan belum matangnya struktur birokrasi yang berjalan di BNNP DIY sehingga jika terdapat dual fungsi personil akan terdapat program-program yang seharusnya bisa disatukan agar optimal tetapi malah diaplikasikan terpisah seperti terdapat dua media sosial untuk menyapa publik khususnya remaja DIY.

Lembaga membutuhkan Standar Operating Procedur (SOP) dalam menjalankan fungsi dan perannya yang dalam penelitian ini adalah implementasi OPR untuk menjalin hubungan dengan remaja DIY. SOP yang diterapkan membuat remaja yang ingin berhubungan dengan BNNP DIY bisa menjalin hubungan dengan jelas dan tidak membingungkan sehingga penting untuk struktur birokrasi yang jelas. Struktur birokrasi yang jelas juga membuat hal-hal menjadi lebih efektif dan

kinerja yang lebih efisien. Oleh karena itu memiliki SOP yang jelas yang efektif menjadi aspek penting selain komunikasi dan pembentuk sumber daya sehingga harus dipersiapkan dengan baik oleh lembaga yang dalam penelitian ini adalah BNNP DIY dan remaja DIY.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan maka terdapat suatu kesimpulan yang bisa diambil yaitu OPR yang diimplementasikan oleh BNNP DIY kepada remaja DIY belum bisa dikategorikan optimal secara keseluruhan dikarenakan masih terdapat aspek-aspek yang belum dilaksanakan. Aspek implementasi yang belum optimal adalah konsisten berkomunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka terdapat saran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengoptimalkan implementasi OPR adalah dengan segera mengajukan permohonan untuk membentuk bidang khusus Kehumasan kepada BNN RI yang berpusat di Jakarta. Hal ini dikarenakan BNN RI telah memiliki bidang sendiri terkait Kehumasan maka setidaknya permohonan bidang khusus Kehumasan di level Provinsi tidaklah berlebihan untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Ivan. (2019). Diy peringkat pertama pengguna narkoba. *Kedaulatan Rakyat Jogja*. Diakses pada tanggal 2 Desember 2019 dari https://www.krjogja.com/web/news/read/88979/DIY_Peringkat_Pertama_Pengguna_Narkoba.
- Iman, Nurul. (2017). Bnn: 27 persen pengguna narkoba pelajar dan mahasiswa. *Republika*. Diakses pada tanggal 2 Desember 2019 dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/30/oymn2n423-bnn-27-persen-pengguna-narkoba-pelajar-dan-mahasiswa>,
- Miles, M. & Huberman, A. & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis, a methods sourcebook*. Amerika Serikat: Sage Publications.

Pemerintah Indonesia. (2007). *Peraturan Presiden Nomor. 83, Tahun 2007, tentang Badan Narkoba Nasional.*

Rakhmatulloh. (2018). Tiga ancaman dunia pendidikan indonesia yang harus diwaspadai. *Sind News*. diakses pada tanggal 8 Desember 2019 dari <https://nasional.sindonews.com/read/1302321/144/tiga-ancaman-dunia-pendidikan-indonesia-yang-harus-diwaspadai-1525227268>

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kombinasi (mix methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sutopo. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Surakarta: UNS



LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : *Organization-Public Relationships* dalam Implementasi P4GN oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) di Kalangan Remaja DIY

Nama : Resmamita

NIM : 16419144004

Program Studi : Ilmu Komunikasi



Chatia Hastasari, S.Sos., M.I.Kom

NIP. 19860624 201504 2 003

Dra. Pratiwi Wahyu Widiarti, M.Si

NIP. 19590723 199803 2 001

Rekomendasi Pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal *Student*
2. Dikirim ke Journal *Jipsindo*
3. Dikirim ke Journal Lain